LAPORAN
HASIL MONITORING DAN EVALUASI PENGAWASAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
TRIWULAN II

DI LINGKUNGAN

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN

KELAS II MERAUKE

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka optimalisasi kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke di dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya. Potensi adanya benturan kepentingan harus dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, obyektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsibel.

Petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke mengacu pada Permenkes Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat dan pegawai di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke terutama dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.

B. TUJUAN

Tujuan evaluasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke untuk efektifitas yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

C. HASIL PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke periode Triwulan II adalah sebagai berikut :

PENGAWASAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN II TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II MERAUKE

No	Bentuk dan Jenis Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai Yang Terkait	Penyebab	Hasil Pengawasan
1	Pejabat atau pegawai menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya	Pejabat/Pegawai	1. Gratifikasi 2. Kelemahan sistem organisasi	Nihil
2	Pejabat atau pegawai menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan	Pejabat/Pegawai	Penyalahgunaan wewenang	Nihil
3	Pejabat atau pegawai menggunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan	Pejabat/Pegawai	1. Penyalahgunaan wewenang 2. Perangkapan jabatan	Nihil
4	Pejabat atau pegawai dalam pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi	Pejabat/Pegawai	. Hubungan afiliasi (pribadi,golongan) 2. Gratifikasi	Nihil
5	Pejabat atau pegawai menyalahgunakan jabatan	Pimpinan dan Pejabat Terkait	. 1. Penyalahgunaan wewenang Perangkapan jabatan 2. Kelemahan sistem organisasi	Nihil
6	Pejabat atau pegawai menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang	Pimpinan satker	1. Penyalahgunaan wewenag 2. Kelemahan sistem organisasi	Nihil
7	Kebijakan pejabat atau pegawai yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi	Pimpinan, Pejabat terkait	. 1. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) 2. gratifikasi	Nihil
8	Pemberian izin dari pejabat atau pegawai yang diskriminatif	Pimpinan dan Pejabat Terkait	Hubungan afiliasi (pribadi,golongan)	Nihil
9	Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah	Pimpinan satker dan subbag terkait	Hubungan afiliasi (pribadi,golongan)	Nihil

10	Pemilihan rekanan kerja oleh pejabat atau pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional	Pejabat dan Subbag Adum	1. Penyalahgunaan wewenang . 2. Hubungan afiliasi (pribadi,golongan) 3. Kelemahan sistem organisasi	Nihil
11	Pejabat atau pegawai melakukan komersialisasi pelayanan publik	Pejabat dan pegawai pelayanan	1. Penyalahgunaan wewenang 2. Kelemahan sistem organisasi	Nihil
12	Pejabat atau pegawai menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi	Pejabat dan pegawai	1. Penyalahgunaan wewenag 2. Kelemahan sistem organisasi	Nihil
13	Pejabat atau pegawai melakukan pengawasan tidak sesuai norma. Standar dan prosedur	Pejabat dan pegawai	1. Perangkapan jabatan 2. Penyalahgunaan wewenang	Nihil
14	Pejabat atau pegawai menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai	Pejabat terkait	1. Perangkapan jabatan 2. Penyalahgunaan wewenang	Nihil
15	Pengangkatan/mutasi yang tidak adil dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu	Pejabat dan Pegawai	Hubungan afiliasi (pribadi,golongan)	Nihil

D. ANALISA PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada awal tahun 2026 telah dilakukan upaya identifikasi pemetaan benturan kepentingan melalui dokumen identifikasi yang disebarkan kepada seluruh pejabat/pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke agar dapat dilakukan pengawasan secara langsung oleh atasan pejabat/pegawai yang bersangkutan. Selama periode Triwulan II Tahun 2026 yaitu April sampai Juni 2026, dari 15 uraian yang berpotensi menyebabkan benturan kepentingan sebagaimana tertuang dalam petunjuk pelaksanaan benturan kepentingan di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke bahwa **tidak ditemukan adanya laporan benturan kepentingan**

E. KESIMPULAN

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke periode Triwulan II Tahun 2026 **tidak ditemukan** adanya laporan terkait benturan kepentingan dalam bentuk apapun yang dilakukan baik oleh pejabat maupun pegawai di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke..

F. RENCANA TINDAK LANJUT

Perlunya dilakukan peningkatan pengawasan terhadap komitmen pejabat dan pegawai di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke untuk terhindar dari benturan kepentingan dalam bentuk apapun.

G. PENUTUP

Demikian laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan tindakan benturan kepentingan Triwulan II di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke.

Mengetahui, Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Merauke	Merauke, 13 Juli 2026 Ketua Tim Pengawasan Benturan Kepentingan
Syarif Abubakar Katili, SH., MSi., MKM. NIP 197305161997031004	Ns. Batseba Linda Imsula, S.Kep NIP 198109122008122001